

TESIS

**PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA/BURUH DENGAN
PENGUSAHA DALAM PERSEROAN PERORANGAN**



Oleh:

**YULIANSYAH
NIM. 2320216310043**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

2025

TESIS

**PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA/BURUH DENGAN
PENGUSAHA DALAM PERSEROAN PERORANGAN**



Oleh:

**YULIANSYAH
NIM. 2320216310043**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2025**

**PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA/BURUH DENGAN
PENGUSAHA DALAM PERSEROAN PERORANGAN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh:

**YULIANSYAH
NIM. 2320216310043**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

2025

**Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui
pada tanggal....**

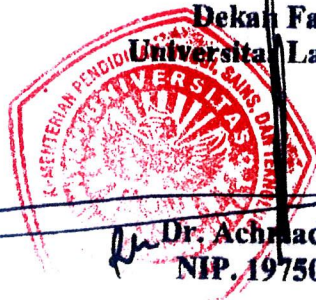
Pembimbing

**Dr. Saprudih, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002**

**Menyetujui Koordinator Program Studi
Program Magister Kenotariatan**

**Dr. Hj. Rahmida Erlyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universita Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YULIANSYAH

NIM : 2320216310043

Program Studi : Magister Hukum Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2025

Yang membuat pernyataan



YULIANSYAH
NIM. 2320216310043



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

YULIANSYAH
2320216310043

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :
5 %

Banjarmasin, 13 Juni 2025

Mengetahui,

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

NIP. 19820610 200501 1 002

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

**PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA/BURUH DENGAN
PENGUSAHA DALAM PERSEROAN PERORANGAN**

Oleh :

Yuliansyah¹, Saprudin²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 102 halaman.

RINGKASAN

Perkembangan bentuk usaha dalam sistem hukum Indonesia mengalami transformasi yang signifikan melalui kehadiran Perseroan Perorangan sebagai entitas hukum baru pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perseroan Perorangan merupakan bentuk badan hukum yang didirikan oleh satu orang, memudahkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk beroperasi secara sah. Namun demikian, kemudahan tersebut belum diiringi dengan pengaturan yang memadai terhadap aspek ketenagakerjaan di dalamnya, khususnya menyangkut hubungan hukum antara pemilik usaha dan pekerja/buruh. Ketidaktertiban dalam penyusunan perjanjian kerja, ketidakjelasan status kerja, hingga praktik pelanggaran hak normatif kerap terjadi di lingkungan Perseroan Perorangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk ideal perjanjian kerja dalam konteks usaha berskala mikro tersebut, serta bagaimana tanggung jawab hukum pemilik usaha terhadap pelanggaran perjanjian kerja yang merugikan pekerja. Dalam kerangka hukum ketenagakerjaan, pemenuhan perlindungan terhadap hak-hak pekerja merupakan hal mendasar, dan pemilik usaha sebagai pemberi kerja wajib menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan kerjanya. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari urgensi untuk mengkaji lebih mendalam hubungan kerja dalam Perseroan Perorangan, baik dari sisi bentuk perjanjian kerja maupun pertanggungjawaban hukumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perjanjian kerja yang terjadi antara pekerja/buruh dengan pemilik Perseroan Perorangan, serta untuk menguraikan secara yuridis tanggung jawab hukum pemilik terhadap pelanggaran perjanjian kerja. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum ketenagakerjaan Indonesia, khususnya dalam kerangka perlindungan pekerja pada skala usaha mikro berbentuk badan hukum tunggal. Selain itu, penelitian ini memiliki kegunaan praktis dalam memberikan rekomendasi kepada pemilik Perseroan Perorangan agar memahami pentingnya pembuatan perjanjian kerja yang sah secara hukum dan implikasi hukum yang

¹NIM. 2320216310043.

²Pembimbing Utama.

dapat timbul apabila isi perjanjian dilanggar. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan aparat pengawasan ketenagakerjaan dalam merumuskan langkah-langkah pengawasan yang lebih adaptif terhadap usaha kecil dan mikro yang kini berbadan hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif, dengan tujuan tidak hanya menjelaskan dan menganalisis peraturan, tetapi juga memberikan solusi normatif atas persoalan yang diangkat. Jenis bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, KUHPerdara, dan Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya; bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum ke dalam praktik hubungan kerja pada Perseroan Perorangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kerja dalam Perseroan Perorangan secara normatif tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga bentuknya dapat berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Namun dalam praktiknya, banyak pemilik Perseroan Perorangan yang mengabaikan pembuatan perjanjian tertulis dan tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, terutama mengenai syarat formil dan materil perjanjian kerja. Ketidaktertiban ini sering kali merugikan pihak pekerja, misalnya dalam hal hak atas upah, waktu kerja, cuti, dan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun Perseroan Perorangan memiliki status badan hukum, tanggung jawab pemilik terhadap pelanggaran perjanjian kerja tetap dapat ditarik secara pribadi apabila terdapat penyalahgunaan status badan hukum, misalnya dengan mencampuradukkan keuangan pribadi dan perusahaan, atau menggunakan badan hukum untuk menghindari kewajiban hukum. Dalam kondisi demikian, asas piercing the corporate veil dapat diberlakukan, sehingga tanggung jawab pribadi pemilik menjadi relevan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pekerja di lingkungan Perseroan Perorangan sangat bergantung pada kepatuhan pemilik usaha dalam memisahkan personalitas hukum, mematuhi kewajiban hukum ketenagakerjaan, dan menyusun perjanjian kerja yang sah dan adil. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembinaan dari pemerintah terhadap pemilik usaha mikro berbentuk Perseroan Perorangan agar mampu melaksanakan kewajiban ketenagakerjaannya dengan baik dan berkeadilan.

PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA/BURUH DENGAN PENGUSAHA DALAM PERSEROAN PERORANGAN

Oleh :

Yuliansyah³, Saprudin⁴

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 102 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Perjanjian Kerja, Pekerja/Buruh dengan Pengusaha, Perseroan Perorangan

Penelitian ini berjudul Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dalam Perseroan Perorangan yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana bentuk perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pemilik usaha dalam bentuk Perseroan Perorangan, serta menelaah bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan terhadap pemilik usaha apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian kerja tersebut. Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dalam memperkaya khasanah ilmu hukum ketenagakerjaan dan kegunaan praktis bagi para pelaku usaha mikro dan pekerja terkait perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Terkait rumusan masalah pertama, penelitian ini menemukan bahwa bentuk perjanjian kerja dalam praktik Perseroan Perorangan sangat beragam, mulai dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) hingga perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), namun sebagian besar dibuat tanpa mematuhi ketentuan formal perundang-undangan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pekerja, khususnya dalam hal kepastian upah, jaminan sosial, dan status hubungan kerja. Tidak sedikit pula perjanjian dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis, yang memperlemah posisi tawar pekerja dan membuka ruang terjadinya penyimpangan terhadap hak-hak normatif.

Sedangkan terkait rumusan masalah kedua, ditemukan bahwa pemilik Perseroan Perorangan tidak dapat sepenuhnya terlindung di balik entitas hukum usahanya, melainkan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja. Tanggung jawab ini dapat berbentuk perdata, administratif maupun pidana, tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan kebijakan perlindungan ketenagakerjaan yang mengatur secara tegas kedudukan hukum dan kewajiban pemilik usaha dalam Perseroan Perorangan.

³NIM. 2320216310043.

⁴Pembimbing Utama.

**EMPLOYMENT AGREEMENT BETWEEN WORKERS/LABORERS AND
EMPLOYERS IN SOLE PROPRIETORSHIP COMPANIES**

By:

Yuliansyah⁵, Saprudin⁶

Master of Notarial Law, Lambung Mangkurat University, 102 pages.

ABSTRACT

Keywords: *Employment Agreement, Workers and Employers, Sole Proprietorship Company.*

This research is entitled Employment Agreement between Workers/Laborers and Employers in Sole Proprietorship Companies. The study aims to examine and analyze the forms of employment agreements in labor relations between workers and business owners operating under the legal structure of Sole Proprietorship Companies, as well as to explore the legal responsibilities imposed on business owners in cases of breach of employment contracts. The research offers theoretical significance to the development of labor law concepts and practical benefits for micro business actors and workers in securing legal protection. This research applies normative legal methods, utilizing statutory and conceptual approaches.

Regarding the first issue, the study reveals that employment agreements within Sole Proprietorship Companies vary, ranging from fixed-term to indefinite-term contracts. However, many of these agreements do not comply with formal legal requirements. Some are even made verbally without written documentation, which causes legal uncertainty for workers, especially concerning wage guarantees, social security, and employment status. Such practices tend to weaken the bargaining power of workers and lead to frequent violations of normative labor rights.

In addressing the second issue, it is concluded that the owner of a Sole Proprietorship Company cannot fully shield themselves behind the company's legal entity. Legal responsibility remains with the owner in the event of a breach of the employment agreement. This liability may take civil, administrative, or criminal forms depending on the nature of the violation. Therefore, labor protection regulations must explicitly define the legal position and obligations of business owners within the Sole Proprietorship framework.

⁵NIM. 2320216310043.

⁶Pembimbing Utama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul “Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dalam Perseroan Perorangan”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Lahirnya entitas hukum baru dalam sistem hukum korporasi Indonesia, yakni Perseroan Perorangan, telah membawa perubahan penting dalam struktur dan dinamika dunia usaha. Perseroan Perorangan yang dapat didirikan oleh satu orang dan memperoleh status badan hukum tanpa melalui akta notaris, telah memberikan peluang besar bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengakses formalitas hukum secara sederhana. Namun, kemudahan tersebut belum secara proporsional diiringi dengan pemahaman serta pengaturan yang memadai mengenai hubungan kerja antara pemilik usaha dan pekerja/buruh di dalamnya. Dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan pentingnya perjanjian kerja secara sah dan tidak memahami tanggung jawab hukumnya sebagai pemberi kerja.

Berangkat dari kenyataan tersebut, penulis merasa perlu untuk mengangkat isu hukum ini ke dalam suatu kajian akademik yang mendalam guna memberikan pemahaman lebih utuh mengenai bentuk perjanjian kerja dalam Perseroan Perorangan, serta tanggung jawab hukum pemilik terhadap pelanggaran perjanjian kerja. Penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diarahkan untuk memberikan sumbangan praktis, baik bagi pelaku usaha, pemerintah, maupun masyarakat pekerja dalam mewujudkan hubungan kerja yang adil dan berkeadilan.

Selama proses penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung, baik secara langsung maupun

tidak langsung. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:


1. Yang Terhormat dan Sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terhormat dan Terpelajar Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. Saprudin, S.H. LL.M., selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan serta masukan kepada penulis di dalam penulisan Tesis ini.
4. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Rekan-rekan Mahasiswa angkatan 2023 Program Magister Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, baik dalam hal data, analisis, maupun penyajian bahasa. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan dan hukum perusahaan, serta menjadi rujukan akademik maupun praktis dalam upaya perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dalam konteks usaha berbentuk Perseroan Perorangan.

Banjarmasin, Juni 2025

Hormat Penulis



Yuliansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian	37
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	43
BAB II BENTUK PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA/BURUH DENGAN PENGUSAHA DI DALAM PERSEROA PERORANGAN.....	44
A. Kedudukan Hukum Perjanjian Kerja sebagai Dasar Hubungan Kerja.....	44
B. Jenis Perjanjian Kerja dalam Perseroan Perorangan.....	53
C. Karakteristik Perjanjian Kerja dalam Perseroan Perorangan	63
BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK PERSEROAN PERORANGAN TERHADAP PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA YANG MERUGIKAN PEKERJA/BURUH.....	73

A. Prinsip Tanggung Jawab Hukum dalam Hubungan Kerja antara Pemilik Perseroan Perorangan dan Pekerja.....	73
B. Bentuk Pelanggaran Perjanjian Kerja dan Akibat Hukumnya bagi Pemilik Perseroan Perorangan.....	83
C. Implikasi Personalitas Pemilik terhadap Pemenuhan Tanggung Jawab Hukum dalam Perseroan Terbatas.....	92
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA